BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah memajukan kebijakan untuk mengembangkan suatu konsep desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan peranan daerah dalam pembangunan nasional atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan daerah otonomi dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, untuk kelancaran roda pemerintahan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom itu sendiri mengandung arti bahwa kepada daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satunya kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi: pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah; menyelenggarakan pengurusan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah; mengadakan anggaran pendapatan; dan belanja daerah serta perhitungannya.

Peranan pendapatan daerah merupakan yang sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan volume, kekuatan, dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 Tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah.

Dalam pemungutan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 82 yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 158 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda;
2. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan, dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak parkir ini diberikan untuk meningkatkan pendapatan daerah, juga merupakan kemakmuran rakyat dalam pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan lebih lanjut bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2004 Bab 2 Pasal 2 mengenai obyek pajak, yaitu:

1. Pajak parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan.
2. Obyek adalah setiap penyelenggaraan parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
3. Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu:
 - a. Gedung parkir
 - b. Pelataran parkir
 - c. Garasi yang disewakan
 - d. Tempat penitipan kendaraan
4. Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu:

- a. Kendaraan bermotor truk gandengan/trailer/kontainer.
- b. Kendaraan bermotor bus/truk
- c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks
- d. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)
- e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)
- f. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Kota Cimahi mengenai Subyek pajak, yaitu:

- Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan fasilitas parkir di luar lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Kota Cimahi Tentang Pajak Parkir, bahwa setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan fasilitas parkir diwajibkan:

- a. Melakukan pembukuan atas jasa parkir yang diselenggarakan;
- b. Menyimpan alat bukti penarikan jasa parkir.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak parkir sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% setiap bulan dari penerimaan penyelenggaraan, pengusaha tempat parkir.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir. Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan aparat pemungut pajak yang belum maksimal.

Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir diperlukan juga struktur pengendalian internal yang baik. Struktur pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik dapat di capai. Tujuan pengendalian internal menurut **Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens**, dalam bukunya “**Jasa Audit dan Assurance**” (2011:316) adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:

1. *Keandalan laporan keuangan.* Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bagi para investor, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk menyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti misalnya (*General Accepted Accounting Principle*) GAAP. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.
2. *Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi.* Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara

efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

3. *Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.* Perusahaan publik, perusahaan nonpublik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Struktur pengendalian internal menjadi salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi yang berwujud maupun tidak. Pengendalian internal penting dalam pemungutan karena dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi dengan meneliti apakah sistem telah sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dan menjamin bahwa setiap penerimaan yang diperoleh telah dicatat dan diorganisasi dengan baik serta disetorkan seluruhnya ke kas Negara.

Pengendalian Internal memiliki andil besar atas terkelolanya berbagai aspek kegiatan Dinas Pendapatan Daerah, salah satunya adalah target penerimaan pajak parkir. Penerimaan dari Pajak Parkir merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dari sektor pajak yang memerlukan pengelolaan yang baik mulai dari prosedur pemungutan hingga kepada pembayaran pada kas daerah. Pemungutan pajak menjadi masalah yang

kompleks, dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta prosedur yang rumit dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak parkir yang disebabkan oleh kecurangan, penyelewengan, dan kesalahan data akuntansi. Dengan maraknya masalah tersebut mutlak adanya suatu pengendalian internal yang baik atas penerimaan pajak parkir, sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat lebih maksimal dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak parkir.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan kedalam skripsi dengan judul:

“PERANAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Kasus Penagihan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Struktur Pengendalian Internal dijalankan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi, khususnya pajak parkir?
2. Seberapa jauh peranan Struktur Pengendalian Internal terhadap penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Struktur Pengendalian Internal yang dijalankan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi, khususnya pajak parkir.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan Struktur Pengendalian Internal terhadap penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Perusahaan (Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengendalian internal di masa yang akan datang.

2. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang pemerintahan daerah khususnya pengendalian internal dan pajak parkir.

3. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Pengendalian Internal yang diterapkan di bidang pemerintahan daerah dan peranannya dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di Kota Cimahi.